

BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung urusan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan wajib non pelayanan dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.7.370.134.597,- dan realisasi Rp.7.211.258.528,- (97,84%), dengan laporan sebagai berikut : Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana dan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui 9 Program, sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.379.058.344,- dan realisasi sebesar Rp.1.332.416.040,- (96,62%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.706.404.973,- dan realisasi sebesar Rp.1.661.775.750,- (97,38%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.38.880.000,- dan realisasi sebesar Rp.38.850.000,- (99,92%).
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.387.219.130,- dan realisasi sebesar Rp.377.453.873,- (97,48%).
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp.3.081.886.150,- dan realisasi sebesar Rp.3.030.427.671,- (98,33%), dengan output :
 - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adminduk sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 65 orang.
 - Terlaksananya Rakor Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun dengan jumlah peserta 57 orang.

- Tersedianya Laporan Hasil Monev Pelayanan Administrasi Dokumen sebanyak 1 dokumen.
 - Terlaksananya Penatausahaan Aset 19 Kabupaten/Kota.
 - Terlaksananya 4 kali Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adminduk.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan anggaran Rp.39.120.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.080.000,- (99,90%), output dari program ini adalah :
- Terlaksananya Bimtek Pendaftaran Penduduk 1 kali dengan jumlah peserta 57 orang.
 - Terlaksananya Bimtek Pencatatan Sipil 1 kali dengan jumlah peserta 57 orang.
 - Terlaksananya Bimtek PIAK 1 kali dengan jumlah peserta 60 orang.
 - Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1 kali dengan jumlah peserta 70 orang.
 - Terlaksananya Bimtek Pelayanan Petugas Adminduk (Front Office) 1 kali dengan jumlah peserta 57 orang.
 - Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 kali dengan jumlah peserta 57 orang.
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penerbitan KTP-Elektronik 4 kali.
 - Terdistribusinya Blangko KTP-EI ke 19 Kab/Kota.
 - Tersedianya Profil Kependudukan Tingkat Provinsi sebanyak 100 buku.
 - Tersedianya Buku Data Kependudukan Per Semester 2 jenis sebanyak 200 buku.
 - Tercapainya Jumlah OPD Provinsi melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 10 OPD.
 - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 7) Program Keluarga Berencana, dengan anggaran Rp.317.466.000,- dan realisasi sebesar Rp.315.596.840,- (99,41%), output dari program ini adalah :
- Teradvokasinya 50 orang pejabat pengelola KB dan PIK R Kabupaten/Kota tentang kesehatan reproduksi remaja.
 - Peningkatan kapasitas pembinaan, penilaian kesatuan gerak PKK-KB-KES Pemberian Penghargaan kepada pelaksana terbaik pelaksana kesatuan gerak PKK-KB-KES.
 - Terlaksananya Pembekalan Ketahanan Keluarga dan Penyerahan Hadiah Lomba KK Model.
 - Terlaksananya Penyerbaluasan Informasi tentang Program KKBPK.
 - Terlaksananya fasilitasi kegiatan di kampung KB sesuai dengan kearifan lokal.

- Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB dan terlaksananya Advokasi dalam rangka Pembinaan Pelayanan KB.
- 8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan anggaran Rp.69.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.100.000,- (99,28%), output dari program ini adalah :
- Tersosialisasinya program KBKK kepada ormas dan orsos.
 - Terlatihnya 50 orang pejabat pengelola KB Kab/Kota dan Guru BK/Pembina konselor.
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Penduduk, dengan anggaran Rp.350.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.346.558.354,- (98,88%), output dari program ini adalah :
- Tersedianya 1 dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.379.058.344	1.332.416.040	96,62
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.706.404.973	1.661.775.750	97,38
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.880.000	38.850.000	99,92
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	387.219.130	377.453.873	97,48
V	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.081.886.150	3.030.427.671	98,33
1	- Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan	35.100.000	34.858.670	99,31
2	- Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data	227.590.000	221.849.521	97,48
3	- Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.720.000	40.628.057	97,38
4	- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	85.640.000	85.640.000	100
5	- Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.505.075	96.285.566	97,75
6	- Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se Sumbar	58.500.000	57.226.500	97,82
7	- Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	34.550.000	34.042.000	98,53
8	- Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	27.590.000	27.590.000	100
9	- Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	43.945.075	43.414.450	98,79
10	- Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan	34.550.000	34.519.231	99,91
11	- Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	85.630.000	85.416.000	99,75
12	- Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sumbar Expo	287.500.000	286.820.669	99,76
13	- Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama dan Pemanfaatan Data	34.550.000	34.490.050	99,83
14	- Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adminduk (DAK)	52.000.000	44.487.400	85,55
15	- Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota Ttg Pencapaian Target Nasional Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (DAK)	80.000.000	77.398.950	96,75
16	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan	120.000.000	119.415.172	99,51

	Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK)			
17	- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (DAK)	88.000.000	84.646.848	96,19
18	- Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil (DAK)	79.000.000	77.128.100	97,63
19	- Bimbingan Teknis PIAK (DAK)	88.000.000	86.788.529	98,62
20	- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK)	80.000.000	79.230.005	99,04
21	- Rapat Koordinasi Dalam Rangka KTP Elektronik (DAK)	85.000.000	84.292.400	99,17
22	- Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK)	105.000.000	104.935.683	99,94
23	- Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester (DAK)	140.000.000	139.814.226	99,87
24	- Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK)	50.000.000	49.998.885	99,99
25	- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	562.542.000	551.703.159	98,07
26	- Bimbingan Teknis Pelayanan Petugas Admindak (Front Office) (DAK)	110.000.000	106.759.200	97,05
27	- Pendistribusian Blangko KTP-EL ke Kab/Kota (DAK)	125.000.000	121.995.295	97,60
28	- Bimbingan Teknis Pengarsipan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	80.000.000	77.144.600	96,43
29	- Penatausahaan Aset Admindakcapil (DAK)	60.000.000	59.995.000	99,99
30	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK (DAK)	81.974.000	81.913.503	99,93
VI	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja	39.120.000	39.080.000	99,90
1	- Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	39.120.000	39.080.000	99,90
VII	Program Keluarga Berencana	917.664.134	829.452.814	90,39
1	- Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	68.250.000	68.207.600	99,94
2	- Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional	110.000.000	109.432.860	99,48
3	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB	41.360.000	41.098.500	99,37
4	- Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal	71.586.000	71.085.380	99,30
5	- Pembinaan Pelayanan KB	26.270.000	25.772.500	98,11
VIII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	69.600.000	69.100.000	99,28
1	- Peningkatan Kapasitas Ormas/Orsos dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	39.120.000	38.620.000	98,72
2	- Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya	30.480.000	30.480.000	100
IX	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	350.500.000	346.558.354	98,88
1	- Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat	350.500.000	346.558.354	98,88

B. Outcome

Dengan dilaksanakannya Program/Kegiatan yang mendukung Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2019 telah didapat hasil setelah pelaksanaan program, diantaranya :

- a) **Program Peningkatan Pengendalian Penduduk :**
 - 1) Meningkatnya upaya perbaikan pengendalian penduduk.
- b) **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga :**
 - 1) Meningkatnya komitmen pejabat pengelola KB Kab/Kota dan guru BK/Pembina konselor sebaya sekolah dalam meningkatkan peran dan fungsi konselor dan pendidik sebaya di sekolah Kab/Kota.
 - 2) Meningkatnya pengetahuan ormas dan orsos tentang ketahanan keluarga.
- c) **Program Keluarga Berencana :**
 - 1) Penguatan komitmen pejabat pengelola KB dan OPD Provinsi dalam peningkatan program KKBPK di Sumbar.
 - 2) Terciptanya keterpaduan program kependudukan, KB Pembangunan Keluarga di Kampung KBKK.
 - 3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan KKBPK.
 - 4) Tersebarluasnya informasi KB dan Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera.
 - 5) Meningkatnya peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program KKBPK dan terpilihnya Kab/Kota terbaik dalam pelaksanaan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB-KES.
- d) **Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja :**
 - 1) Meningkatnya komitmen pejabat pengelola KB dan PIK R Kabupaten/Kota tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e) **Program Penataan Administrasi Kependudukan :**
 - 1) Meningkatnya kemampuan aparatur terhadap sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan.
 - 2) Terselenggaranya rapat koordinasi tingkat kab/kota tentang pencapaian target nasional akte kelahiran anak usia 0-18 tahun.
 - 3) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
 - 4) Meningkatnya pemahaman aparatur pendaftaran penduduk Kab/Kota.
 - 5) Meningkatnya kemampuan aparatur tentang pencatatan sipil.
 - 6) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
 - 7) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pemanfaatan data dan kependudukan.
 - 8) Terlaksananya rakor penerbitan KTP-el.
 - 9) Tersajinya informasi tentang gambaran, kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
 - 10) Tervalidasinya data perkembangan kependudukan tingkat Provinsi.
 - 11) Tersajinya informasi yang akurat tentang data kependudukan.
 - 12) Tervalidasinya data agregat kependudukan per-semester tingkat provinsi.

- 13) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- 14) Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 15) Meningkatnya kemampuan aparatur pelayanan adminduk di front office.
- 16) Terlaksananya fasilitasi pendistribusian blangko KTP el di Kab/Kota.
- 17) Meningkatnya pengetahuan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengarsipan dokumen kependudukan.
- 18) Meningkatnya tertib pengelolaan aset di Kab/Kota.
- 19) Meningkatnya pelaksanaan efisiensi dan efektifitas kegiatan.
- 20) Terlaksananya pemantauan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan.
- 21) Terlaksananya fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan Sumbar Expo.
- 22) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan Profil Kependudukan yang sesuai dengan aturan.
- 23) Terlaksananya pemantauan pemeliharaan database kependudukan.
- 24) Meningkatnya pelayanan aparatur pendaftaran penduduk.
- 25) Meningkatnya kualitas profil kependudukan Kab/Kota.
- 26) Terlaksananya pembinaan administrasi pencatatan sipil Kab/Kota se Sumbar.
- 27) Terwujudnya harmonisasi pelaksanaan adminduk di Sumatera Barat.
- 28) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- 29) Meningkatnya kualitas pengelolaan SIAK.
- 30) Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- 31) Meningkatnya kualitas inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan Kab/Kota.
- 32) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

C. Capaian Indikator Kinerja daerah

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 4 (empat) indikator kinerja daerah untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan guna memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019. Adapun

realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD untuk Tahun 2019 dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini :

**Table Realisasi Capaian IKU Dinas PPKBKPS
Tahun 2019**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 Tahun (%)	2,42	2,68	89,26
2.	Prevalensi Pemakaian Alat Konstrasepsi (CPR) (%)	55,40	70,45	127,17
3	Unmed Need (Kebutuhan ber KB) (%)	7	6,66	104,86
4	Pertumbuhan Laju Penduduk (LPP) (%)	1,10	0,18	183,64

Berdasarkan data tabel capaian IKU RPJMD diatas, diketahui bahwa sebagian besar indikator yang ada capaian indikator pada Tahun 2019 telah dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian diatas 100%.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan :

- DPPKBKPS belum mempunyai Fungsional ADB yang sesuai harapan sehingga tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengelolaan data dan sitem administrasi kependudukan terutama dalam melaksanakan pemilahan data kependudukan untuk pembersihan data

Dengan Solusi :

Meningkatkan kapasitas ADB yang ada dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis baik yang diadakan oleh pusat maupun provinsi.

Merekrut ASN ataupun tenaga kontrak yang akan dijadikan ADB

- Kurangnya kemampuan dan pemahaman sebagian sdm dukcapil dan OPD akan kerjasama pemanfaatan data

Dengan Solusi :

Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan data.

- Tidak siapnya Dinas Kominfo Provinsi dan Kab./Kota untuk menyiapkan jaringan VPN (tertutup) untuk setiap lembaga pemerintah.

Dengan Solusi :

Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dalam percepatan pemasangan jaringan VPN (tertutup).

- Masih kurangnya pemahaman OPD terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dalam perumusan kebijakan serta pengalokasian anggaran.

Dengan Solusi :

Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan akses data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan dan pengambilan kebijakan serta pemanfaatan card reader KTP-el.

- OPD banyak yang belum memanfaatkan akses data kependudukan.

Dengan Solusi :

Memfasilitasi OPD untuk mengakses data kependudukan melalui DWH dengan mengkoordinasikan dan menyiapkan pemenuhan syarat administrasi berupa juknis Pemanfaatan data kependudukan.

- Masih banyak OPD yang belum mempunyai aplikasi yang dibutuhkan untuk implementasi pemanfaatan data kependudukan.

Dengan Solusi :

Berkoordinasi dengan Diskominfo serta OPD terkait untuk pembuatan dan optimalisasi integrasi aplikasi di OPD pengguna dengan aplikasi data kependudukan (DWH) di DPPKBKPS untuk kebutuhan teknis pemanfaatan akses data kependudukan.

- Masih belum seragamnya perlakuan Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam menerbitkan dokumen kependudukan baik di Bidang Pendaftaran Penduduk maupun di Bidang Pencatatan Sipil, hal ini disebabkan karena permasalahan yang ditemui belum diakomodir dalam aturan adminduk.

Dengan Solusi :

DPPKBKPS melakukan rapat dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk menyamakan permasalahan dan solusi dengan membuat “Buku Putih” kemudian “Buku Putih” yang sudah disepakati tingkat Provinsi dikirim ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk dikoreksi lagi.

- Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan umumnya kendala yang ditemui adalah sebagai berikut :
 1. Belum ada analisa data terhadap capaian penerbitan dokumen kependudukan.
 2. Masih adan Kab/Kota yang belum melakukan pemutakhiran data.
 3. Belum efektifnya komunikasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga informasi yang disampaikan kurang dipahami oleh masyarakat.
 4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Dengan Solusi :

1. DPPKBKPS melalui surat nomor : 470/315/DPPKBKPS.4/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 meminta kepada Kab/Kota agar melakukan pemutakhiran data kependudukan by name by address secara berkala.
2. Surat nomor 470/386/DPPKBKPS.4/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peningkatan Pelayanan Dukcapil untuk Pemilu 2019 meminta Kab/Kota agar melakukan pelayanan setiap hari pada hari libur.
3. Surat nomor 470/857/DPPKBKPS.4/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permintaan Penempatan Anak KKN untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meminta kepada Universitas Negeri Padang dan surat nomor 470/844/DPPKBKPS.4/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Permintaan Penempatan Anak KKN untuk Dinas Dukcapil Kab/Kota kepada Universitas Andalas untuk memanfaatkan pemutakhiran data kependudukan.

2) Program Peningkatan Pengendalian Penduduk :

- Terlambatnya penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dari waktu yang telah direncanakan. Keterlambatan ini disebabkan terlambatnya pengiriman nama anggota tim dari OPD terkait.

Dengan Solusi :

Diusahakan untuk melakukan kegiatan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan.

- Sedikit terhambatnya koordinasi internal tim penyusun. Koordinasi internal tim penyusun terhambat dikarenakan kesibukan masing-masing anggota tim sehingga beberapa anggota tidak dapat hadir dalam rapat internal tim.

Dengan Solusi :

Dalam penyusunan dokumen diperlukan komitmen yang kuat untuk menyepakati keikutsertaan dalam rapat-rapat pembahasan oleh semua anggota Tim.

- Kesulitan pengumpulan data Bab II. Terdapat beberapa masalah dalam pengumpulan data yakni data tidak ada, data hanya ada pada tahun terakhir atau tidak ada data time series dan data tidak ada penjabaran hingga level Kab/Kota.

Dengan Solusi :

Sebaiknya setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki Bank Data/Buku Data yang dipublikasi untuk kebutuhan eksternal organisasi, sehingga tidak sulit untuk memberikan data kepada pihak lain.

- Kab/Kota tidak mengacu pada Surat Gubernur Nomor 470/771/DPPKBKPS.2/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan perbedaan sistematika penulisan GDPK antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota yang menyusun GDPK.

Dengan Solusi :

Kita harus tetap mensosialisasikan dan mengajak Kab/Kota untuk menyesuaikan format GDPK dengan surat Gubernur Nomor 470/771/DPPKBKPS.2/IX/2018 tanggal 19 September 2018.

- Kekurangan alokasi anggaran kegiatan menyebabkan beberapa undangan dari Kab/Kota tidak dapat terpenuhi.

Dengan Solusi :

Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk dapat melakukan supervise dan sinkronisasi GDPK Provinsi dengan GDPK Kab/Kota.

3) Program Keluarga Berencana :

- Belum sinergi antar OPD terkait memperingati Hari Keluarga Nasional

Dengan Solusi :

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD terkait dalam memperingati Harganas sebagai upaya peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Masih minimnya OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota dalam mengintegrasikan Program Kegiatannya pada Lokasi Kakabeti.

Dengan Solusi :

Melakukan koordinasi dengan OPD terkait Provinsi dan OPD PPKB Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat Kakabeti sesuai dengan kearifan lokal setempat dengan memperhatikan beberapa hal penting antara lain, Penentuan lokasi Kakabeti dan jadwal pelaksanaan, Penetapan materi pembekalan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan masyarakat kampung keluarga berencana dengan melibatkan OPD terkait Kab/Kota, Menetapkan bentuk pelatihan yang akan dilaksanakan di Kakabeti sesuai kearifan lokal setempat.

- Masih kurangnya pengelolaan pelayanan KB dan pengelolaan Data KB pada Dinas PPKB Kabupaten/Kota yang meliputi penguatan manajemen, pemberdayaan masyarakat ketersediaan SDM sarana prasarana.

Dengan Solusi :

Melakukan pertemuan Dinas PPKB Kab/Kota se-Sumatera Barat dengan menampilkan inovasi Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman. Inovasi ini terkait dengan pengelolaan data dan pelayanan KB secara online oleh masyarakat melalui HP Android.

4) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja

- Dinas PPKBKPS belum sinergi dengan program kegiatan OPD terkait dalam mengatasi permasalahan remaja yang telah, sering dan berpotensi terjadi dimasa mendatang.

Dengan Solusi :

- Membentuk Tim Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat Provinsi.
- Mensinergikan program kegiatan dengan Dinas PPKB Kab/Kota terkait permasalahan di kalangan remaja.

- Melakukan advokasi ke Kab/Kota khususnya ke Guru BK dan Pejabat Pengelola KB.
- 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga :
- Kurangnya motivasi ASN Provinsi tentang pentingnya Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada keluarga dan lingkungannya sendiri.

Dengan Solusi :

- Menetapkan beberapa calon KK Model ASN Pendukung Program KKBPK Tahun 2019.
- Membentuk Panitia Penilai ASN KK Model dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 476-399-2019 tanggal 7 Mei 2019.
- Membuat dan memverifikasi kuesioner penilaian ASN KK Model.
- Menentukan Pemenang ASN KK Model dan memberikan sosialisasi pembekalan tentang KKBPK.

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Dinas PPKBKPS selama tahun 2019 tidak ada menerima penghargaan nasional.

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

Terkait dengan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018, Dinas PPKBKPS tidak ada tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018.

Padang, 17 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001